



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**UNIT KERJA** : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : AHMAD MUSLIH
- Jabatan : SEKRETARIS
- NHK : 733827

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>885.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m <sup>2</sup> /70 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000		
2. Tanah Seluas 1.015 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HIBAH DENGAN AKTA , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 650.000.000		
3. Tanah Seluas 12.112 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BATANG HARI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 50.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>87.000.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>972.000.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>44.708.334</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>927.291.666</b>

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**UNIT KERJA** : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : MUHAMMAD HERPANDRI HADI
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 873005

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.800.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 5225 m2/96 m2 di MERANGIN, WARISAN Rp. 900.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 5225 m2/96 m2 di MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>135.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA BEAT METIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
3. MOTOR, HONDA SPD MOTOR R2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>14.500.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>162.385.019</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.111.885.019</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>782.197.025</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.329.687.994</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**UNIT KERJA** : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : **HERNOWO**
- Jabatan : **KEPALA BIDANG**
- NHK : **734718**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>300.000.000</b>
1. Tanah Seluas 123 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI	Rp.	
300.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>85.000.000</b>
1. MOBIL, CHEVROLET SPIN 1.5 LT M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	80.000.000
2. MOTOR, HONDA C1C02N16M2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	5.000.000
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>13.000.000</b>
<b>D. SURAT BERTHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.250.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>403.250.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>403.250.000</b>

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**UNIT KERJA** : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : AHMAD FADLAN
- Jabatan : KEPALA BIDANG
- NHK : 516474

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>460.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/112 m2 di SAROLANGUN , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
2. Tanah Seluas 23000 m2 di SAROLANGUN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 140.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>24.500.000</b>
1. MOTOR, YAMAHA XEON GT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
2. MOTOR, YAMAHA BJM-L A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>31.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.000.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>516.500.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>175.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>341.500.000</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**UNIT KERJA** : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IR. EKA SUSILAWATI, ME
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 845658

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.515.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/149 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000		
2. Tanah Seluas 344 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
3. Tanah Seluas 10.620 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
4. Tanah Seluas 6.300 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000		
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
6. Tanah Seluas 803 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>114.000.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>105.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>193.450.000</b>



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.927.450.000
III. HUTANG	Rp.	15.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.912.450.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**UNIT KERJA** : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : JUNAIDI
- Jabatan : KEPALA UNIT
- NHK : 854793

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 323.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KOTA JAMBI ,  
HASIL SENDIRI Rp. 178.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/36 m2 di TANJUNG JABUNG  
BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 28.500.000

- MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.  
3.000.000
- MOTOR, HONDA CB150X Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.  
25.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 7.800.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 359.300.000

**III. HUTANG** Rp. 144.406.225

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 214.893.775

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.